

Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

Trecy Austin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka Palembang

Email: trecy.austin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas bertujuan menjelaskan implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, kelompok tepat waktu dan kelompok terlambat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung program. Berdasarkan teori *Ripley and Franklin*, ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya dimensi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, terakhir kinerja dan dampak. Penelitian ini menurut jenis data yang digunakan adalah penelitian *mix method*, strategi eksplanatoris sekuensial, dengan populasi adalah ibu-ibu rumah tangga miskin yang menggunakan dana bergulir SPP. Sampel penelitian sebanyak 95 responden kelompok tepat waktu dan terlambat yang tersebar di 15 desa Kecamatan Muara Lakitan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, keterlambatan pencairan dana disebabkan karena jumlah pelaksana Tim Verifikasi hanya 1 orang. Selain itu, alat transportasi yang digunakan Tim Verifikasi milik pribadi tanpa bantuan akomodasi selama pencairan dana di Lubuk Linggau. Beberapa responden ada yang mengaku tidak diawasi oleh pelaksana selama menjalani usaha dikarenakan mereka sudah memiliki usaha dengan penghasilan yang sudah cukup baik, yang tidak pernah mengalami penunggakan. Hambatan dalam pengembalian uang pinjaman karena pemasukkan per bulan yang *fluktuatif*. Namun, hambatan ini dapat di atasi oleh pihak UPK di Kecamatan. Selanjutnya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program di Kecamatan Muara Lakitan adalah Kepatuhan pelaksana dan anggota kelompok peminjam, kemampuan pelaksana kelompok peminjam, serta partisipasi bersama masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

ABSTRACT

The research titled Implementation of Women's Lending and Saving Program Program in Muara Lakitan Sub-district of Musi Rawas Regency aims to explain the implementation of Women's Lending Program Group, timely and late group groups and to identify factors that support the Program. Based on Ripley and Franklin's theory, there are three factors that influence

the success of policy implementation, such as the dimension of compliance level, smoothness of routine and absence of problems, past performance and impact. This research according to data type used is mix method research, sequential explanatory strategy, with the population is poor housewife using SPP revolving fund. Samples of the research were 95 respondents of the group on time and late which spread in 15 village. Based on observations and interviews, the delay in fund disbursement was caused by the number of Verification Team executors only 1 person. In addition, the means of transportation used by the Private Verification Team without the assistance of accommodation during the disbursement of funds in Lubuk Linggau. Some respondents claimed that they were not supervised by the executor during the business because they already have a business with a good enough income, which never experienced delinquency. Obstacles in loan repayment due to fluctuating monthly income. However, this barrier can be overcome by the UPK in the District. Further factors supporting the success of program implementation in Muara Lakitan are Compliance executor and member, capability of group implementer of borrower, and also community participation

Keywords: *Implementation Saving and Loans of Women's Group Program*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor seperti lemahnya potensi masyarakat, tidak adanya modal usaha, juga disebabkan oleh buruknya sarana dan prasarana pendukung kegiatan perekonomian yang merupakan dampak langsung dari kurang optimalnya pembangunan khususnya di perdesaan. Presiden Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan membuat kebijakan tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009 yang terdapat tiga agenda pembangunan nasional.

Peraturan Presiden tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang berupaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat, program tersebut diluncurkan pada 30 April 2007.

Program ini memadukan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah serta didukung swadaya masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Wilayah khusus dan daerah tertinggal, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2007.

Observasi awal yang dilakukan, program ini terpantau terjadwal baik oleh pegawai UPK, meskipun tahun 2015 sudah mulai terjadi kenaikan kelompok yang terlambat dalam mengembalikan modal pinjaman. Menurut Informasi Pengurus UPK, Kecamatan Muara Lakitan pernah meraih juara terbaik kedua Tahun 2008-2009 di Wilayah Sumatera Selatan dalam melaksanakan Program PNPM-MP dana bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

Berdasarkan data Kecamatan Muara Lakitan Tahun 2015, Kecamatan dengan luas wilayah 520.900 Ha dan jumlah penduduk 45.024 jiwa, dengan

rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 108,09 yang berarti dari 100 penduduk perempuan, terdapat kurang lebih 110 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani perkebunan dan buruh perkebunan kelapa sawit dan karet dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahannya bahwa, kepemilikan lahan perkebunan di kecamatan ini sebagian besar didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dalam negeri maupun perusahaan asing, sedangkan masyarakat hanya bekerja sebagai buruh perkebunan dan sangat sedikit masyarakat yang memiliki lahan perkebunan pribadi, sehingga sangatlah penting bagi fasilitator PNPM-MP untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini karena upah buruh perkebunan saja masih kurang memberikan pendapatan masyarakat ditambah dengan harga jual karet dan buah kelapa sawit yang bersifat fluktuatif.

Permasalahan yang sama berkaitan dengan pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sangat minim dengan sumber daya alamnya, kecuali, hanya dengan mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Menjadikan masalah kemiskinan dan kemelaratn masih menjadi sebuah masalah yang sulit ditanggulangi oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. (Nuzul Firman, 2009:13)

Hal lain yang membuat peneliti tertarik yaitu terdapat 6.168 keluarga

sangat miskin dari total jumlah penduduk 380 ribu jiwa yang tersebar dalam 14 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas (dalam <http://www.antarasumsel.com>, diakses 9 September 2016). Padahal Program PNPM-MP baik bidang infrastruktur dan dana bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) telah dilaksanakan sejak Tahun 2008, dimana tahun 2016 ini sudah menginjak tahun ke-9 (sembilan) berjalan. Adanya berita tersebut memperlihatkan betapa masih kurang berhasil diimplementasikan.

Dalam mengukur implementasi program diambil populasi kelompok yang sudah mengikuti program tersebut cukup lama paling tidak setengah dari waktu pelaksanaan program yang telah berjalan yakni 5 (lima) tahun sehingga kelompok tersebut mampu menggambarkan sejauh mana program yang mereka ikuti. Penelitian ini dibagi dua kelompok tepat waktu dan terlambat dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Kelompok Peminjam Dana Bergulir

No	Kelompok Peserta	Definisi
1	Kelompok Tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekumpulan ibu-ibu yang meminjam dana bergulir dan secara rutin mengembalikan sesuai prosedur yang ditentukan tanpa hambatan. 2. Pembayaran pinjaman dan bunga yang dilakukan sesuai waktu yang ditentukan.
2	Kelompok terlambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekumpulan ibu-ibu yang meminjam dana bergulir dan dalam pengembalian terjadi hambatan secara <i>financial</i> dan jarak tempuh. 2. Pembayaran pinjaman dan bunga yang tidak lancar.

Sumber: Wawancara Tahun 2017

Berikut data beberapa kelompok yang sudah mengikuti dan mendapatkan pinjaman dana bergulir simpan pinjam

kelompok perempuan (SPP) selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Data Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

No	Nama Desa	Tepat Waktu		Terlambat		Jumlah	
		Kelompok	Orang	Kelompok	Orang	Kelompok	Orang
1	Prabumulih I	20	100	6	30	26	130
2	Prabumulih II	17	85	8	40	25	125
3	Semete	25	125	14	70	39	195
4	Sungai Pinang	24	120	9	45	33	165
5	Muara Rengas	19	95	7	35	26	130
6	Anyar	27	135	14	70	41	205
7	Pendingan	2	10	1	5	3	15
8	Semangus Baru	5	25	3	15	8	40
9	Semangus Lama	9	45	8	40	17	85
10	Bumi Makmur	3	15	0	0	3	15
11	Pelita Jaya	8	40	6	30	14	70
12	Sidomulyo	6	30	9	45	15	75
13	Marga Baru	13	65	11	55	24	120
14	Lubuk Pandan	5	25	2	10	7	35
15	Muara Lakitan	61	305	33	165	94	470
	Jumlah	244	1220	131	655	375	1875

Sumber: PNPM-MP kecamatan Muara Lakitan 2010-2016

Dapat dilihat bahwa, ada 375 kelompok (1875 orang) yang telah mengikuti program PNPM-MP dana bergulir SPP ini selama 5 tahun. Data di atas, menunjukkan bahwa beberapa anggota kelompok SPP terbagi menjadi kelompok tepat waktu dan terlambat dalam pengembalian pinjaman. Kriteria peminjam tepat waktu yang dimaksud adalah kelompok peminjam yang seluruh anggotanya rutin melaksanakan pengembalian uang pinjaman setiap satu bulan sekali. Kriteria peminjam terlambat yang dimaksud adalah kelompok peminjam yang salah satu atau beberapa anggota kelompoknya yang menunggak.

Fenomena ini dapat dilihat dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dimana usaha-usaha yang banyak dimiliki oleh masyarakat masih skala

kecil, salah satunya usaha toko kelontong. Usaha kelompok perempuan belum mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan daerah lain.

Berikut data yang memperlihatkan banyaknya usaha toko kelontong di Kecamatan Muara Lakitan, dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Jenis Usaha di Kecamatan Muara Lakitan

No.	Desa/Kelurahan	Pasar Tidak Permanen	Mini Market	Toko Kelontong
1	Pian Raya	-	-	9
2	Bumi Makmur	1	-	24
3	Tri Anggun Jaya	-	-	11
4	Harapan Makmur	-	-	4
5	Mukti Karya	-	-	3
6	Sindang Laya	-	-	6
7	Semangus	-	-	26
8	Pendingan	-	-	16
9	Anyar	-	-	10
10	Muara Rengas	-	-	8
11	Sungai Pinang	-	-	56
12	Semete	-	-	16
13	Lubuk Pandan	-	-	9
14	Muara Lakitan	1	-	44
15	Prabumulih I	-	-	20
16	Prabumulih II	1	-	5
17	Pelita Jaya	-	-	19
18	Sido Mulyo	-	-	40
19	Marga Baru	1	1	40
20	Semangus Baru	1	-	39
	Jumlah	5	1	403

Sumber: bps.go.id

Jumlah usaha toko kelontong banyak terdapat di 2 (dua) Desa, yaitu Desa Sungai Pinang sebanyak 56 toko kelontong, disusul Kelurahan Muara Lakitan sebanyak 44 toko kelontong. Usaha toko kelontong ini menjadi alternatif usaha yang dipilih oleh sebagian masyarakat. Pada kenyataannya mengembangkan usaha selain toko kelontong begitu sulit, banyak masyarakat memilih usaha toko kelontong yang relatif aman namun pada dasarnya tidak begitu menghasilkan.

Kekurangan modal usaha kerap menjadi kendala anggota

kelompok SPP, apalagi jika mereka bekerja sebagai petani biasa dengan modal dana bergulir SPP yang tidak begitu banyak, membuat masyarakat tidak mampu memenuhi permintaan konsumen dalam skala besar.

Berdasarkan kenyataan empiris tersebut, maka pelaksanaan Program PNPM-MP dana bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan harus diteliti lebih lanjut, dengan melibatkan masyarakat atau publik dalam memberikan penilaian mengenai hasil dari pelaksanaan program.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terhadap Kelompok Tepat Waktu dan Kelompok Terlambat?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan di Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?

C. TUJUAN PENELITIAN

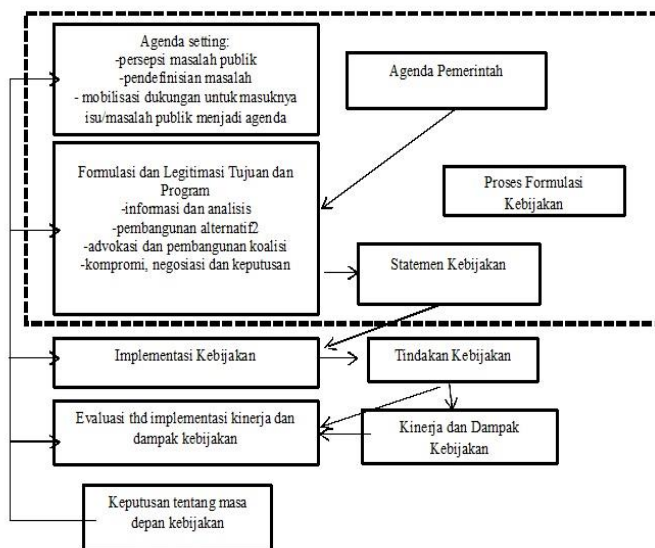
1. Menjelaskan Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap kelompok tepat waktu dan kelompok terlambat di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

D. LANDASAN TEORI

Pilihan model yang kebijakan yang paling efektif adalah jika kita bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif artinya bersifat *top down* dan *bottom up*. Teori Ripley dan Franklin kombinasi antara pendekatan *top down* dan *bottom up*, dan teori ini lebih praktis karena dimensinya lebih sederhana sehingga indikator penelitiannya mudah diatur.

Ripley dan Franklin (1986:11) memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual”. Menurut keduanya, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non- birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang didesain dengan baik. Sedangkan perspektif faktual mengasumsikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Dengan demikian, kepatuhan pelaksana terhadap atasan perlu ditunjukkan sebagai bukti keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

Model tahapan kebijakan dari Ripley hendak menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus panjang. Siklus pendeknya adalah: (1) penyusunan agenda pemerintah, (2) agenda pemerintah, (3) formulasi dan legitimasi kebijakan, (4) kebijakan. Adapun gambar dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Ripley 1985:49

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik – Ripley

Dalam teori Ripley dan Franklin terdapat tiga cara utama dalam menentukan berhasilnya suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. keberhasilan implementasi diukur melalui tingkat kepatuhan.
2. keberhasilan implementasi dicirikan dengan kelancaran rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah.
3. keberhasilan implementasi akan mengarah pada kinerja yang diinginkan dan dampak dari kebijakan yang diteliti.

Adapun aspek dari 3 (tiga) cara dominan guna keberhasilan suatu implementasi menurut Ripley dan Franklin, yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan (*compliance*) pada bagian birokrasi bawahan/*underlings* terhadap birokrasi atasan/*superiors* terhadap suatu mandat khusus yang diatur dalam

suatu peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Kepatuhan terhadap Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan Tujuan PNPM-MP akan lebih terarah apabila pelaku-pelaku PNPM-MP dalam melakukan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian mentaati/melaksanakan ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang meliputi:

- (1) Desa berpartisipasi, (2) Kriteria dan Jenis Kegiatan, (3) Mekanisme Usulan Kegiatan, (4) Swadaya Masyarakat, (5) Kesetaraan dan Keadilan Gender, (6) Jenis Kegiatan yang dilarang (*Negative List*), (7) Sanksi, (8) Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal, (9) Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal.

- b. Kepatuhan terhadap Ketentuan Pendanaan Bahwa PNPM-MP akan terlaksana apabila program tersebut dibiayai bersama antar pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP.

2. Kelancaran rutinitas adalah implementasi dimana keputusan dapat dibuat pada saat yang tepat, dilaksanakan tanpa adanya rintangan dan penundaan serta tidak menimbulkan konflik. Terdapat dua syarat yang memungkinkan timbulnya rutinitas implementasi kebijakan yaitu:
 - a. Adanya proses yang tetap dalam

pembuatan keputusan implementasi dan mulai melaksanakan proses tersebut yang seterusnya dilakukan.

- b. Adanya kesepakatan mengenai distribusi pengaruh yang tetap/stabil dalam pembuatan keputusan implementasi dan konsisten memberikan pengaruh kuat terhadap kelompok pelaksana yang kecil sepanjang waktu tanpa adanya tantangan atau konflik yang serius.

Implementor yang memahami tugas pokok dan fungsinya kemungkinan besar akan mampu melaksanakan tugasnya sesuai tugas yang diberikan kepadanya, dan implementor yang melaksanakan keberhasilan implementasi. Sehubungan dengan penjelasan di atas, indikator kelancaran rutinitas fungsi yang akan diteliti adalah:

- a. Ketersediaan Sumber Daya (Manusia, sarana dan prasarana).
 - b. Proses Kelancaran rutinitas tugas pokok.
3. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengacu dan mengarah pada kinerja yang diinginkan (*desired performance*) dan dampak (*impact*) yang dikehendaki dari semua program yang ada. Aspek yang akan diteliti, yaitu:
- a. Muncul Kemandirian Masyarakat
 - b. Tercapai Kesejahteraan Masyarakat.

Kemandirian masyarakat akan terlihat kinerja dari masyarakat dengan implementor dalam menjalankan program, sedangkan tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan dampak yang dikehendaki, hal ini sesuai dengan tujuan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *mixed methods* strategi eksplanatoris sekuensial. Penelitian pendekatan strategi eksplanatoris sekuensial adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif.

2. Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi	No Pernyataan
Implementasi (Ripley and Franklin:1986)	Kepatuhan	1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dasar PNPM-MP	1. Sosialisasi	1
			2. Muayawarah	2
			3. Pelatihan pendidikan	3
			4. Sikap Pegawai	4-6
	Kelancaran Rutinitas fungsi	2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Pendaan	1. Ketelitian pelaksana UPK	1
			2. Ketaatan penggunaan uang pinjaman	3-4
3. Kesiapan Kembalikan uang pinjaman			6	
Kinerja dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan	1. Ketersediaan sumber daya	1. Ketersediaan sarana dan prasarana	1-4	
		2. Ketersediaan pelaksana UPK	5	
		3. Kelancaran distribusi dana pinjaman	6	
	2. Proses Kelancaran Pelaksanaan	1. Sikap pelayanan petugas UPK	1-2	
		2. penanganan responden terhadap proses pinjaman dana	5	
		3. Adanya Rutinitas Pengawasan	6	
1. Munculnya Kemandirian Masyarakat	2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat	1. Kemampuan pengembalian responden semakin baik	1-2	
		2. Adanya pengembangan usaha	3-4	
1. Ketersediaan Modal Usaha	2. Kesejahteraan Masyarakat	1. Ketersediaan Modal Usaha	1 dan 6	
		2. Kesejahteraan Masyarakat	2-5	

Sumber: Teori Ripley and Franklin (1896)

3. Jenis dan Sumber Data

- 1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yakni kuisisioner dan wawancara dan observasi langsung yang akan digunakan sebagai data utama dalam penelitian.
- 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber lain, melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan

perundang-undangan, dokumen yang berhubungan dengan PNPM-MP berupa jurnal/literatur, arsip-arsip, laporan-laporan pengelolaan dan bergulir SPP di Kecamatan Muara Lakitan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

Kriteria	Populasi		Sampel
	Kelompok	Orang	Orang
Tepat Waktu	244	1220	62
Terlambat	131	655	33
Jumlah	375	1875	95

Sumber: diolah penulis tahun 2017

Adapun jumlah sampel tepat waktu dan terlambat yang didapat dari Tabel 3.3, dengan perhitungan $1220 : 1875 = 62$ orang, dan $655 : 1875 \times 95 = 33$ orang. Sehingga didapatkan sampel peminjam tepat waktu sebanyak 62 orang dan terlambat sebanyak 33 orang.

Sebagai pelengkap data, berupa wawancara didapatkan sampel terhadap pihak pelaksana di Kecamatan Muara Lakitan dan peminjam dana bergulir SPP, diantaranya adalah 1 orang pelaksana Ketua BKAD Kecamatan Muara Lakitan, 1 orang tim pendanaan pinjaman, 1 orang tim verifikasi, 1 orang pendamping lokal, dan masyarakat peminjam dana SPP secara acak yang ditemui selama observasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner
2. Studi Kepustakaan (*Library research*)
3. Observasi
4. Wawancara tidak terstruktur

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisisioner (daftar pertanyaan). Penentuan nilai skor menggunakan skala rating (*rating-scale*). Adapun alasan menggunakan *rating-scale* dalam penelitian ini adalah karena dalam penggunaannya, skala rating ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya.

Alternatif jawaban dengan menggunakan skala rating diberi skor dari nilai 1 sampai 5. Dengan demikian ada 5 alternatif jawaban untuk kinerja dan dampak yang dikehendaki, yaitu:

Skor 1, untuk jawaban Sangat Tidak Setuju

Skor 2, untuk jawaban Tidak Setuju

Skor 3, untuk jawaban Ragu-Ragu

Skor 4, untuk jawaban Setuju

Skor 5, untuk jawaban Sangat Setuju

Dalam proses pengumpulan data, *instrument* atau alat yang dipakai adalah kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Sebelum data hasil kuisisioner diolah, maka terlebih dahulu dilakukan:

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Mann Whitney (kelompok tepat waktu dan terlambat)

7. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif

1. Data yang diperoleh ditabulasikan dan diklasifikasikan berdasarkan pengelompokkan responden yaitu berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan.
2. Analisis dilakukan dengan mengetahui tinggi rendah rata-rata tanggapan responden pada tiap item kuesioner. Distribusi

frekuensi dari variabel implementasi diperoleh dari frekuensi skor rata-rata menurut responden dari sejumlah item kuesioner dan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk tiap-tiap dimensi.

- Frekuensi skor rata-rata dari seluruh responden pada tiap item kuesioner sehingga dapat diketahui jarak nilai terendah sampai dengan tertinggi, yaitu dengan mengurangi nilai tertinggi dengan yang terendah, kemudian dibagi jumlah kelas.

$$\frac{R}{k}$$

$$= 0,8$$

Di : I : Panjang kelas interval
man
a

R : Rentang yaitu dengan mengurangi nilai tertinggi dengan yang terendah
K : Jumlah kelas

Setelah mengetahui jarak interval, maka kategori dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1,00 – 1,80 = sangat rendah
- 1,81 – 2,60 = rendah
- 2,61 – 3,40 = sedang
- 3,41 – 4,20 = tinggi
- 4,21 – 5,00 = sangat tinggi

- Setelah dihasilkan data tabel, memperkuat penelitian dibutuhkan data penunjang berupa wawancara dari kegiatan observasi di lapangan.

2. Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis data studi kasus yang akan penulis lakukan lebih bersumber pada data-data hasil pengumpulan sebelum, selama dan sesudah kegiatan simpan pinjam perempuan berlangsung. Melengkapi dan membuktikan hasil analisis data studi kasus ini penulis akan menggunakan teknik triangulasi. Melihat hasil observasi dan wawancara dan menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian implementasi.

F. HASIL PENELITIAN

Implementasi Program Dana Bergulir PNPM-MP di Kecamatan Muara Lakitan dikategorikan telah berhasil baik terhadap kelompok tepat waktu dan terlambat. Adapun perbandingan kelompok tepat waktu dan terlambat sebagai berikut:

Tabel 5.1 Hasil Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Nilai Rata-Rata		Semua Kelompok
			Tepat Waktu	Terlambat	
1	Dimensi Tingkat Kepatuhan	Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dasar PNPM-MP	4,14	3,94	4,04
		Ketentuan Terhadap Pendanaan	4,05	3,82	3,93
		Rata-rata	4,09	3,88	3,98
2	Kelancaran Rutinitas	a. Ketersediaan Sumber Daya	4,10	3,74	3,92
		b. Proses Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok	4,13	3,93	4,03
		Rata-rata	4,11	3,83	3,97
3	Kinerja dan Dampak	a. Munculnya Kemandirian Masyarakat	4,23	3,60	3,91
		b. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat	4,30	3,83	4,06
		Rata-rata	4,26	3,71	3,98
Keberhasilan implementasi Program SPP			4,16	3,81	3,98

Sumber: Data Primer, Tahun 2017

Kedua kelompok memiliki perbedaan dari setiap dimensi khususnya pada dimensi kinerja dan dampak. Pada dimensi kinerja dan dampak yang dilihat dari munculnya kemandirian masyarakat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat, kelompok tepat waktu memiliki nilai rata-rata masing-masing sebesar 4,26 sedangkan pada kelompok terlambat adalah sebesar 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program PNPM-PM SPP di Kecamatan Muara Lakitan pada kelompok terlambat memang berhasil memberikan dampak tercapainya kesejahteraan masyarakat, sedangkan kelompok tepat waktu sangat berhasil memberikan dampak akan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Membahas rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program PNPM-MP SPP di Kecamatan Muara Lakitan, dalam buku *Policy Implementation and Bureaucracy* (1986:11), fitur yang paling penting dalam keberhasilan implementasi *The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation*. Faktor yang tidak terkendali ini yaitu apakah ada faktor-faktor di luar teknis (yang telah melampaui batas kontrol dari implementor) yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian program, sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.

Faktor merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sehingga kurang hilangnya salah satu faktor mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat diajukan dari tiga faktor, sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pelaksana (Pelaksana dan anggota kelompok pinjaman SPP)

Menurut Ripley dan Franklin (1986:11), perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. *The Proliferation and complexity of Government Programs* menjelaskan bahwa kerumitan program dilihat dari tingkat kerumitan aturan program yang bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya program diimplementasikan. Anggota kelompok harus patuh terhadap surat perjanjian yang telah dibuat sejak awal pengajuan pinjaman, mengembalikan uang pinjaman sesuai tanggal kartu monitoring yang telah diberikan, dan tidak melakukan pelanggaran dengan penyalahgunaan pemakaian dana bergulir SPP untuk kepentingan pribadi pelaksana PNPM-MP. Selain itu, kepatuhan pihak pelaksana terhadap ketentuan dasar yang ditetapkan pemerintah pusat mempengaruhi kelancaran program simpan pinjam kelompok perempuan.

2. Kemampuan Pelaksana, kelompok peminjam, serta partisipasi bersama masyarakat.

Seperti yang telah di data pada awal pembahasan. Dari hasil wawancara terhadap informan, bahwa pendidikan formal dan informal masih kurang baik sehingga responden kurang mengetahui dan memahami esensi dari program PNPM-MP SPP. Hal tersebut sesuai

dengan pujiastutik (2011:54) yang menyatakan semakin baik tingkat pendidikan masyarakat maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat juga akan semakin baik sehingga menjadi faktor kunci yang penting bagi pengembangan program PNPM-MP SPP. Dari keterangan informan karena kurang pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program PNPM- MP SPP tidak memakai dana bergulir untuk usaha yang lebih produktif.

Hal itu ternyata mampu diimbangi dengan kemampuan para pelaksana untuk pendampingan di lapangan, mengawasi usaha masyarakat yang mengalami penunggakan, yang kadang mengalami kerugian finansial. Komunikasi antar organisasi pelaksana yakni Pelaksana PNPM-MP di Muara Lakitan dan responden RTM peminjam dana bergulir di Kecamatan Muara Lakitan berjalan lancar. Faktor komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan jalannya program dana bergulir SPP. Tim verifikasi sejak awal memberikan syarat-syarat ketentuan yang berlaku, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama peminjaman dana bergulir SPP. Pendamping lokal, mendampingi responden dalam tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Dalam hal komunikasi yang terhalang dengan jarak desa yang jauh, dapat dibantu dengan jaringan media komunikasi telepon.

Dalam buku *Policy Implementation and Bureaucracy* (1986:11), fitur yang paling penting dalam keberhasilan implementasi salah satunya juga, yaitu *The Participation of Governmental Units*

at All Territorial Levels Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam implementasi program tersebut, seperti tokoh masyarakat, tempat ibadah masjid sebagai salah satu sarana pemberian informasi selain di UPK PNPM-MP SPP.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap kelompok tepat waktu dan terlambat telat dikategorikan berhasil diimplementasikan. Perbedaan kelompok tepat waktu dan terlambat sangat terlihat pada indikator kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program simpan pinjam kelompok perempuan yang dilihat yang dilihat dari kemandirian dan kesejahteraan anggota pada kelompok tepat waktu berada pada kategori sangat berhasil, sedangkan pada kelompok terlambat berada pada kategori sangat berhasil, sedangkan pada kelompok terlambat berada pada kategori berhasil. Perbedaan keberhasilan dari kinerja dan dampak ini disebabkan karena ada beberapa responden kelompok terlambat yang usahanya masih mengalami ekonomi yang rendah, diperlihatkan bahwa usaha yang dijalani bukan milik pribadi atau masih menumpang dengan anggota kelompoknya. Ketika terjadi permasalahan dalam menjalankan usaha masih membutuhkan bantuan anggota kelompok.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi program PNPM-MP SPP diantaranya:

- a. Kepatuhan pelaksana dan anggota kelompok pinjaman SPP. Patuh terhadap surat perjanjian yang telah dibuat sejak awal pengajuan pinjaman, mengembalikan uang pinjaman sesuai tanggal kartu monitoring yang telah diberikan, dan tidak melakukan pelanggaran dengan penyalahgunaan pemakaian dana bergulir SPP untuk kepentingan pribadi pelaksana PNPM-MP. Selain itu, kepatuhan pihak pelaksana terhadap ketentuan dasar yang ditetapkan pemerintah pusat mempengaruhi kelancaran program simpan pinjam kelompok perempuan.
- b. Kemampuan pelaksana, kelompok peminjam, serta partisipasi bersama masyarakat kemampuan para pelaksana untuk pendampingan di lapangan, mengawasi usaha masyarakat yang mengalami penunggakan. Komunikasi antar organisasi pelaksana yakni Pelaksana PNPM-MP di Muara Lakitan dan responden RTM peminjam dana bergulir di Kecamatan Muara Lakitan. Faktor komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan jalannya program dana bergulir SPP. Tim verifikasi sejak awal memberikan syarat-syarat ketentuan yang berlaku, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama peminjaman dana bergulir SPP. Pendamping Lokal, mendampingi responden dalam tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Fitur yang paling

penting dalam keberhasilan implementasi salah satunya juga, yaitu *The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels* Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah partisipasi tokoh masyarakat, tempat ibadah masjid sebagai salah satu sarana pemberian informasi selain di UPK PNPM-MP SPP.

2. Saran

a. Saran Teoritis

Dapat dijadikan acuan untuk mengkaji implementasi berguna untuk bahan kajian yang bermanfaat pada penelitian selanjutnya.

b. Saran Praktis

1. Disarankan pelaksana lebih ketat dalam hal pemberian dana pinjaman kepada anggota kelompok yang tidak mampu berkomitmen dalam usaha.
2. Syarat-syarat peminjaman lebih diperketat lagi dengan menambahkan satu syarat yaitu mencantumkan surat keterangan miskin dari RT setempat. Menghindari kesenjangan sosial atau penyalahgunaan dana pinjaman oleh pelaksana UPK atau masyarakat yang mampu.
3. Pihak UPK PNPM-MP berkoordinasi/menjalin kerjasama dengan instansi terkait penyedia pelatihan, dan kerjasama dengan pemerintah diluar daerah, agar usaha dijalankan lebih berkembang.
4. Diharapkan responden mampu lebih kreatif dan mau berkembang agar pemasukan keluarga lebih baik dan perputaran pinjaman berjalan lancar.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. 1991. *Congress, the Bureaucracy and Public Policy*, 5 th ed. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- [2] Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [3] Buku Petunjuk Teknik Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Edisi Juli 2007.
- [4] Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. United States of America. Congressional Quarerly Press.
- [5] Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- [6] Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. United States of America. Congressional Quarerly Press.
- [7] Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- [8] Nugroho D, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- [9] Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- [10] Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Ratminto, dan Winarsih, A.S. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12] Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- [13] Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- [14] Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- [15] Prasetyo, Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [16] Sriati. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Palembang: Unsri Press
- [17] Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [18] Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [19] Sujianto, Agus Eko. 2007. *Aplikasi Statistik dengan SPSS untuk Pemula*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Jurnal:

- [20] Anderson, Meredith, Shrum Weasley. 2007. *Circumvention and Social Change: ICTs and the Discourse of Empowerment*, Laramie, *Scholarly Journals*, Vol, 30. ISSN: 07491409.
- [21] Brian J, Cook. 2010. *Arenas of Power in Climate Change Policymaking*. *The Policy Studies Journal*. Vo. 38, No. 3. ISSN: 0190292X.
- [22] Farruku, Eglantina. 2015. *The Political Development of Women in Albania*, *European Journal of Sustainable Development* , 4,3, 13-22 Vol, 19. ISSN: 2239-5938.

Thesis:

- [22] Firman, Nuzul. 2009. *Pengaruh Implementasi PNPB-Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sriwijaya. Tesis: tidak dipublikasikan.
- [23] Mardiah, Intan. 2014. *Implementasi Program Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan Dalam Mendekatkan Bahan Bacaan Kepada Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin*. Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sriwijaya. Tesis: tidak dipublikasikan.
- [24] Nurdinsa, Rayan. 2010. *Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin)*. Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sriwijaya. Tesis: tidak dipublikasikan.
- [25] Nurzaman, Nanang. 2011. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sriwijaya. Tesis: tidak dipublikasikan.

- [26] Riska Wulandari, Putu. 2013. *Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng*. Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Tesis: dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan:

- [27] Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
- [28] Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- [29] Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Internet:

- Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Musi Rawas. 9 September 2016. <<http://www.antarasumsel.com>>
- Muara Lakitan Dalam Angka Tahun 2016. 27 November 2016. <<http://www.musirawaskab.bps.go.id>>.